



# Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Politik Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam Konflik Agraria Lokal)

**Aulia Asmarani**

Internasional Women University, Bandung, Indonesia

E-mail: [aulia@iwu.ac.id](mailto:aulia@iwu.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-05	<p>This study aims to describe and analyze the Political Communication of the Head of Cipajalu Village in agrarian conflicts in his area. This research uses descriptive qualitative research. The focus of this research is political communication implemented by the Head of Cipanjalu Village. Data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the political communication conveyed by the Head of Cipanjalu Village was persuasive in the form of conveying messages directly, taking a personal approach, and being more open to the community both in conveying public complaints and just criticism and suggestions. The second is the use of the media as a tool in conveying political communication in the form of word of mouth through Karang Taruna, LPMD, and BPD in Cipanjalu Village, and finally by political lobbying and negotiations with parties involved in agrarian conflicts, namely the Perum Perhutani and PTPN VIII. One of the supporting factors for political communication mentioned above is the good financial condition of the Village Head and the Head of Cipanjalu Village who is able to read the situation and conditions of the community and other parties with an interest in Cipanjalu Village's agrarian resources. The political communication that was conveyed was right on target so as to be able to resolve agrarian conflicts and be able to prosper the village community. The inhibiting factor is the limited access to information and knowledge for the people of Cipanjalu village, which results in limited social and political education, especially in the context of agrarian cases.</p>
<b>Keywords:</b> <i>Political Communication;</i> <i>Political;</i> <i>Village Head;</i> <i>Agrarian Conflict.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-05	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Komunikasi Politik Kepala Desa Cipajalu dalam konflik agraria di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Fokus penelitian ini ialah Komunikasi politik yang diterapkan oleh Kepala Desa Cipanjalu. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang disampaikan oleh Kepala Desa Cipanjalu, adalah secara persuasif berupa penyampaian pesan-pesan secara langsung, melakukan pendekatan secara personal, serta dengan lebih terbuka terhadap masyarakat baik dalam menyampaikan keluhan masyarakat maupun sekedar kritik dan saran. Kedua ialah penggunaan media sebagai alat dalam penyampaian komunikasi politik berupa penyampaian dari mulut ke mulut melalui Karang Taruna, LPMD, dan BPD yang ada di Desa Cipanjalu, serta yang terakhir dengan loby-lobby politik dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam konflik agraria yaitu pihak Perum Perhutani dan PTPN VIII. Salah satu factor pendukung komunikasi politik tersebut di atas adalah kondisi financial Kades yang baik dan Kepala Desa Cipanjalu mampu membaca situasi dan kondisi masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sumber-sumber agraria Desa Cipanjalu. Komunikasi politik yang disampaikan tepat pada sasaran sehingga mampu menyelesaikan konflik agraria serta mampu mensejahterakan masyarakat desa. Factor penghambatnya adalah terbatasnya akses informasi dan pengetahuan bagi rakyat desa Cipanjalu sehingga berakibat pada terbatasnya masyarakat terdidik secara social politik khususnya dalam konteks kasus-kasus agraria.</p>
<b>Kata kunci:</b> <i>Komunikasi Politik;</i> <i>Politik;</i> <i>Kepala Desa;</i> <i>Konflik Agraria.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Fenomena konflik dan kekerasan sudah berkembang sedemikian rupa dan telah menem-

bus alam budaya masyarakat. Dalam pemahaman yang lain, kekerasan yang dilakukan pada masa tertentu di Indonesia dipandang sebagai seni mereka dalam menghadapi atau menyelesaikan konflik yang ada, hal itu dilakukan sebagai membenaran diri atas tindakan yang dilakukan

oleh massa dengan menilai hukum positif yang ada sebagai konstitusi yang tidak dapat dipercaya lagi. hal ini tidak hanya terkait dengan masalah-masalah umum, seperti ketimpangan social ekonomi dan budaya, ketidakadilan politik dan sektarianisme ideology kehidupan, tetapi juga masalah-masalah yang bersifat individual (Wiryono, 2000).

Menangani suatu konflik perlu berbagai pendekatan yang hingga kini dikenal beberapa istilah:

1. Pencegahan konflik, secara umum mengacu pada strategi mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan
2. Penyelesaian konflik, mengacu pada upaya pengakhiran kekerasan melalui persetujuan perdamaian
3. Pengelolaan konflik untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi para pihak yang terlibat
4. Resolusi konflik pada umumnya menangani akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih permanen diantara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik, melainkan juga mencapai resolusi dari berbagai akar persoalan
5. Transformasi konflik. Pada umumnya mengatasi sumber-sumber konflik social politik yang lebih luas dan mengubah aspek-aspek negative menjadi aspek-aspek positif.

Konflik agraria selalu hadir dalam setiap periode rezim yang berkuasa. Sengketa bisa bersifat perdata, artinya sengketa antar individu warga negara, maupun sengketa structural yang melibatkan rakyat melawan pemerintah. Dalam hal penguasaan tanah (objek hak) oleh individu atau kelembagaan (subjek hak) idealnya tanah harus mampu dikuasai baik secara de facto maupun de jure. Namun dalam kasus-kasus agraria yang bersifat skturktural, hal ini tidak terjadi. Sengketa pada umumnya terjadi karena perampasan atau pengambilalihan hak atas tanah –baik secara de facto atau de jure – yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pemodal besar terhadap rakyat (Nirwana, 2007; Konflik Agraria di Kehutanan: Kasus Tanah Cigembong, Garut, Jabar; Karsa Jurnal Pembaruan Pedesaan dan Agraria).

Kendati kekuasaan politik telah berganti, namun perangkat rezim politik yang berlaku masih sangat kuat dalam bekerja melanggengkan proses-proses penguasaan dan juga eksploitasi sumber daya alam. Ketimpangan dan ketidak-

adilan yang dialami oleh masyarakat pada akhirnya kerap berujung menjadi konflik. Kondisi inilah yang senantiasa mewarnai berbagai proses perjuangan masyarakat dalam memperebutkan akses kelola sumber daya agrarian.

Di sector kehutanan pun tak luput selalu hadir konflik semacam ini. Menurut Noer Fauzi dalam bukunya yang berjudul Bersaksi untuk Pembaruan Agraria dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, konflik di sector kehutanan biasanya bersumber dari bertumbuhkannya klaim hak atas tanah dan atau alam lain yang berasal dari alas yang berbeda, yang diyakini oleh masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk dipertahankan fungsi maupun penguasaan kawasan dan sumber dayanya. Pada pertarungan dalam konflik agraria di Indonesia selalu hadir tiga pihak utama, yaitu: pemerintah, swasta atau pemodal besar dan rakyat. Sumber-sumber konflik biasanya berasal dari adanya dominasi suatu system penguasaan yang berasal dari hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar kepada para pemodal besar dalam mengembangkan usahanya mengelola tanah dan kekayaan alam lain, termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu hak-hak masyarakat yang telah hidup dan mengembangkan suatu system tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaan alam diabaikan dan dilanggar begitu saja.

Begitu pula dengan sengketa tanah kehutanan dan Perkebunan yang terjadi di kampung Palintang, Desa Cipanjal Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat. Dinamika perebutan penguasaan dan pengelolaan lahan kehutanan dan Perkebunan di kampung tersebut sangat dinamis pasca kolonialisme Belanda. Terakhir petani kampung Palintang kembali melakukan okupasi lahan tahun 2008 kemarin setelah hampir lima tahun lebih ditutup oleh Perhutani. Kepala Desa Cipanjal yang sudah menjabat untuk ke tiga kalinya periode saat ini, juga terlibat dalam dinamika tersebut. Baik sebagai warga masyarakat biasa maupun setelah menjabat menjadi Kades hingga kini. Bagaimana komunikasi politik Kepala Desa Cipanjal tersebut juga dalam menangani konflik agraria kehutanan dan Perkebunan inilah yang akan diekslore oleh penulis.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknis deskripsi. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisa

mengenai penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan.

Menurut Boulding (dalam Liliweri, 2005:289) ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik seperti:

1. Adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik.
2. Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan.
3. Analisis perilaku semua pihak yang terlibat.
4. Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian.
5. Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog.
6. Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
7. Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya.
8. Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Deutch (dalam Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Kepala Desa Cipanjalu berdasarkan penelitian ini, lebih dominan mengambil langkah mengelola konflik dalam pusran konflik agraria di wilayahnya. Konflik yang mengemuka antara masyarakat dengan perusahaan BUMN yang ada di wilayah adalah Perum Perhutani dengan PTPN VIII Bukittunggul cukup sering terjadi. Kepala Desa Cipanjalu tidak menghindar maupun meredam konflik tersebut, tapi diarahkan dinamika dan solusinya agar menguntungkan semua pihak.

Komunikasi politik Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam konflik agraria di wilayahnya juga tidak terlepas dari pembacaan situasi analisis social ekonomi politik yang tepat dan strategi peny-

elelesaian yang dipilih dengan tepat. Komunikasi politik menyambungkan semua system yang ada pada system politik, termasuk system politik masa kini dan masa lampau. Oleh karena itu, aspirasi dan berbagai kepentingan dari semua stakeholder politik dapat tersampaikan dan melahirkan berbagai kebijakan. Apabila komunikasi politik berjalan lancar, wajar dan sehat; system politik akan mencapai tingkat responsive yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan rakyat serta tuntutan perubahan zaman. Kepala Desa Cipanjalu memetakan dengan tepat aspirasi dan berbagai kepentingan semua pihak yang berkonflik dalam perebutan sumber agraria di desanya. Kades faham betul titik lemah masing-masing pihak yang berkonflik terlepas dari sudut pandang atau paradigma mereka dalam memandang persoalan agraria tersebut.

Seperti yang penulis bahas di atas, persoalan agraria di setiap jengkal sumber agraria di Indonesia ini tidak akan terselesaikan hingga ke akar persoalan yang sebenarnya bagi masyarakat Indonesia. Karena memang banyak factor yang mempengaruhinya, yang paling urgent adalah tergantung pada keberpihakan politik agraria penguasa negeri ini. Mayoritas kebijakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia belum menyentuh akar konflik agraria; sekalipun hal ini dibantah oleh pemerintah, bukti di lapangan justru berbicara sebaliknya: kebijakan penyelesaian konflik menjadi bagian dari pemeliharaan konflik. Pendekatan Hak tampaknya ditinggalkan oleh akar rumput dalam pembangunan wacana untuk memperjuangkan hak atas agraria, baik itu diwujudkan sebagai penutupan paksa alat produksi korporasi; tuntutan pencabutan ijin pemerintah pada korporasi; penolakan bentuk-bentuk legitimasi untuk perampasan ruang hidup; dan okupasi lahan untuk meneruskan penghidupan. Pendekatan akses, yang dipromosikan oleh Peluso dan Ribot sebagai Teori Akses, tampaknya menjadi landasan bagi akar rumput untuk menyelesaikan konflik agraria struktural dengan caranya sendiri. Sedangkan Pendekatan Ekososiologi tampaknya menjadi landasan teoritik untuk melegitimasi posisi akar rumput dan ruang hidupnya dalam pusran konflik agraria struktural. (Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria ; Kus Sri Kuntoro).

Hal ini disadari sepenuhnya oleh kepala desa Cipanjalu sehingga langkah penyelesaian yang Kades tersebut ambil memang cukup untuk memenangkan pertarungan-pertarungan kecil saja bagi rakyat untuk mendapatkan akses

pengelolaan dan pemanfaatan lahan garapan perhutani dan perkebunan Bukittunggul. Rakyat desa Cipanjaluh masih memerlukan upaya panjang hingga pada kedaulatan hak atas sumber agraria sepenuhnya untuk rakyat. Karena tentunya muara dari perjuangan masyarakat atas kedaulatan sumber daya alam tersebut adalah terpenuhinya hak-hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan hidup dari sumber-sumber agraria yang mereka kuasai tersebut. Semua itu berkaitan dengan penyelesaian persoalan agrarian dalam skala nasional juga.

Kepala Desa Cipanjaluh memahami betul kepentingan sekaligus kelemahan masyarakatnya. Kades juga memahami kebijakan agraria yang belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat petani. Sehingga Kades banyak melakukan maneuver politik praktis di lapangan untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria, baik konflik tanah kehutanan, perkebunan maupun konflik sumber daya air. Rakyat desa Cipanjaluh adalah masyarakat semi urban karena cukup dekat dengan kotamadya dibandingkan desa-desa di kabupaten lain. Meski demikian akses ekonomi, pengetahuan dan Pendidikan tidak didapat sepenuhnya didapat masyarakat desa karena keterbatasan strata social ekonomi. Tetapi budaya konsumerisme cukup terpapar dari hedonism budaya urban. Karena itu Kepala desa menggunakan pendekatan komunikasi semi feodal dan semi kapitalisme untuk Mengendalikan rakyat desanya. Dia menokohkan diri, mencitrakan dirinya sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dan mampu menangani berbagai persoalan ekonomi, politik social secara pribadi dan public, khususnya yang berkaitan dengan akses pengelolaan dan pemanfaatan lahan perhutani maupun perkebunan yang menjadi focus perhatian utama rakyat desa Cipanjaluh yang 90% bermata pencaharian petani. Kepala Desa Cipanjaluh mampu menyentuh persoalan mendasar masyarakatnya dan berkomunikasi dengan efektif sehingga masyarakat cukup terkendali tapi juga responsive terhadap perubahan masa demi masa. Saat ini bahkan kepala desa cipanjaluh tersebut telah terpilih hingga tiga periode.

Kepala desa Cipanjaluh berkomunikasi cukup efektif dengan pihak pihak Perhutani dan Perkebunan Bukittunggul. Kades Cipanjaluh melakukan loby-loby politik dan negosiasi dengan pihak kehutanan, perhutani dan juga perkebunan PTPN VIII untuk mendapatkan kesepakatan bersama secara formal maupun informal tentang segala persoalan-persoalan

lahan perhutani maupun perkebunan bukit tunggul. Komunikasi politik tersebut di atas tidak akan efektif tanpa melalui proses panjang dalam memahami analisis kepentingan, posisi, peluang, kekuatan, kelemahan dari pihak-pihak penguasa agraria local dan nasional juga situasi objektif realitas persoalan agraria masa lampau hingga kini. Hal tersebut membutuhkan ketrampilan atau ketrampilan politik praktis yang cukup. Komunikasi politik tanpa diikuti dengan pengetahuan dan ketrampilan politik praktis yang mumpuni tidak akan berjalan efektif.

Sebagai contoh, proses pengajuan program Perhutanan Sosial dari masyarakat kepada kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2017 kemarin. Selain dinamika baik di kalangan masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani dan kalangan tim pengaju Perhutsos dari kementerian dan dari Dinas Propinsi Jabar, Kades Cipanjaluh mampu memanager konflik tersebut. Tentunya perilaku politik Kades tersebut sesuai dengan paradigma politik agrarian yang dia yakini. Kades Cipanjaluh mengakomodir tim perhutsos Propinsi Jabar yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang perum perhutani yang secara kepentingan politik lahan bertentangan dengan kepentingan petani. Kades menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang cukup berarti antara perum perhutani dan masyarakat penggarap di Desa Cipanjaluh. Adapun program perhutsos tetap diajukan dan disetujui oleh kades Cipanjaluh. Akan tetapi hingga kini program tersebut belum terimplimentasi di lapangan karena memang belum adanya kesadaran penuh tentang kedaulatan agraria dari petani penggarap. Hal tersebut disadari oleh Kades. Kades memberikan lagi narasi pada public, bahwa Kades sudah mengupayakan seoptimal mungkin program perhutsos yang diajukan masyarakat. Akan tetapi semua pihak dapat melihat masyarakat sendiri yang tidak gigih dan belum memiliki konsep yang siap dituangkan dalam program perhutsos bersama kementerian LHK tersebut. Fakta social politik tersebut membuat pihak-pihak yang memperjuangkan perhutsos sejak awal pun menyadari bagaimana komunikasi politik yang sudah dilakukan selama ini oleh Kades Cipanjaluh dalam menangani konflik kepentingan penguasaan agraria di wilayah desa Cipanjaluh.

Contoh kasus local yang lain adalah perebutan akses mata air akhir tahun 2018 di kampung Palalangan dan kampung palintang Desa Cipanjaluh. Warga kampung palalangan mengeluh sudah lama kekurangan air setiap musim

kemarau. Setelah diusut ternyata beberapa titik mata air memang dikuasai beberapa orang pengusaha local. Ketika warga mengeluhkan hal tersebut juga kepada Kades yang mengizinkan pengusaha-pengusaha local terbut mengakses mata air untuk usaha, Kades mengatakan semua itu diberikan izinnya dengan syarat yang ketat. Jika merugikan masyarakat berarti pengusaha-pengusaha melakukan pelanggaran dan silahkan masyarakat memprotesnya. Akhirnya sekitar 200 an warga mengamuk dan merusak pipa-pipa air milik para pengusaha local tersebut. Setelah itu dikumpulkanlah semua pihak oleh Kades Cipanjal. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan para pengusaha air diminta bertanggung jawabkan semua pelanggaran yang sudah dilakukan, mengganti kerusakan yang sudah terjadi akibat oleh amukan warga, membayar kerugian warga yang kekeringan dalam kurun waktu tertentu selama ini dan menghentikan/ menutup operasi usahanya karena sudah meresahkan warga. Para pengusaha yang memprotes kebijakan Kades tersebut ditanggapi dingin oleh Kades dengan mengatakan bahwa: "Saya sudah sejak awal menyatakan silahkan berusaha asal warga tidak sampai kekurangan akses air. Kalo sampai terjadi seperti ini bahkan warga sudah mengamuk, mohon maaf sudah saatnya bapak-bapak pengusaha menutup dulu usaha airnya".

Persoalan akses dan perusahaan mata air dalam perumperhutani pun Kades Cipanjal mendapatkan insentif dari usaha bersama tersebut. Kades Cipanjal menerima dan juga memberikannya kembali kepada pihak perum perhutani sebagai pembayarakan bahi hasil program PHBM petani bersama Perum perhutani. Kades mengetahui tidak semua petani membayar bagi hasil tersebut kepada pihak perum perhutani. Kades Cipanjal mengambil langkah penyelesaian secara politis di local sebagai upaya sementara penyelesaian konflik agraria local. Komunikasi politik berperan penting dalam memelihara dan mengembangkan budaya politik yang ada dan berlaku serta sudah menjadi landasan yang mantap dalam system politik yang mapan dan handal. Budaya politik dalam konflik agraria local mungkin tidak jauh dari yang Clifford Gertz katakan dalam bukunya "Senjata Orang-Orang Kalah". Hal ini tampaknya disikapi dengan tegas namun fleksibel oleh Kades Cipanjal. Jika terdapat petani warganya yang melakukan tindakan yang dapat 'dianggap' criminal oleh Perum Perhutani maupun PTPN VIII, maka Kades akan 'menyelesaikannya' terlebih dahulu sebelum persoalan menjadi rumit.

Tentu saja hal tersebut dilakukan demi kepentingan rakyat desanya secara keseluruhan. Kepatuhan dalam batasan tertentu tetap dilakukan kades dan masyarakat mengingat hukum dan kebijakan agraria belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat tani. Meski demikian Kepala Desa Cipanjal juga berupaya membangun posisi tawar yang seimbang dengan pihak perhutani dan perkebunan agar terbangun kesepakatan yang juga menguntungkan, minimal tidak merugikan rakyatnya.

Banyak hal yang juga menjadi kekurangan PerumPerhutani dalam mengimplementasikan kebijakan agraria pemerintah yang juga tidak memenuhi hak-hak kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. PTPN VIII perkebunan Bukit tunggul pun pada akhirnya tidak mampu mensejahterakan buruh dan masyarakat desa yang mereka kelola sumber agrariannya. Evaluasi perusahaan-perusahaan negara yang belum mampu menjawab persoalan agraria bangsa mungkin akan menjadi tulisan tersendiri, tidak akan terangkum dalam penelitian kali ini. Kekurangan dan juga kelemahan pihak-pihak perusahaan tersebut menjadi posisi tawar yang penting bagi Kepala Desa Cipanjal dan rakyatnya. Sehingga kompromi jalan tengah didapatkan sebagai solusi sementara akses rakyat pada sumber-sumber agraria di wilayah desa mereka dan sekitarnya.

Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kemudian Kepala Desa Cipanjal membangun transaksi politik tidak tertulis dengan masyarakat desanya. Dengan kemampuan propagandanya juga kemampuan Kades dalam mengelola konflik agraria, ekonomi, social juga politik, maka masyarakat tersugesti dengan ketokohan dan kepemimpinannya. Padahal tidak akan menutup kemungkinan sosok-sosok lain ada yang memiliki kapasitas yang sama dan berkontribusi dalam memimpin desa dan penyelesaian berbagai persoalannya. Tapi karena komunikasi politik yang dibangun Kades incumbent juga berperan dalam membangun kepercayaan dan rasa ketergantungan masyarakat maka terpilihlah Kades tersebut hingga tiga periode kini.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai komunikasi politik Kepala Desa dalam konflik agrarian Desa Cipanjal Kec. Cilengkrang Kabupaten

Bandung tahun 2019, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi politik Kepala Desa Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam konflik agraria di wilayahnya juga tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi analisis social ekonomi politik yang tepat dan juga strategi penyelesaian yang dipilih dengan tepat.
2. Penyelesaian konflik Desa Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kabupaten Bandung masih memerlukan upaya panjang hingga sesuai harapan masyarakat karena kedaulatan petani atas agrarian dan kesejahteraannya belum juga terpenuhi. Meski lahan perum perhutani dan PTPN VIII Bukittinggul sudah dapat diakses dan dikelola rakyat petani desa Cipanjalu, tetap saja penyelesaian konflik agrarian hingga ke akar masalahnya akan sangat tergantung pada kebijakan negara secara keseluruhan dan political will agrarian negara.

## **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Antoro, Kus Sri. 2010. Konflik-konflik Sumberdaya Alam di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB, tidak diterbitkan.
- (2011). Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. ?p=1158&lang=en, diakses 10 Maret 2013.
2012. Bertani atau Mati, <http://selamatkanbumi.com/bertani-atau-mati/>, diakses 10 Maret 2013.
- Alfian, 1991. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Ali, Novel, 1991. Peradaban Komunikasi Politik, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bachriadi, Dianto. 2007. Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. Makalah Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007
- Burns, Peter. 1999. The Leiden Legacy Concepts of Law Indonesia. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Choirudin, Udin. 2013. Merawat Nafas Panjang Perjuangan Agraria, <http://selamatkanbumi.com/merawat-nafas-panjang-perjuangan-agraria-risalah-kongres-ii-forum-komunikasi-masyarakat-agraris-fkma/>, diakses 10 Maret 2013.
- FIKA. 2013. Surat Terbuka Kepada Presiden RI. <http://www.change.org/petitions/surat-terbuka-forum-indonesia-untuk-keadilan-agraria-kepada-presiden-republik-indonesia-untuk-penyelesaian-konflik-agraria>, dan <http://www.kpa.or.id/>
- Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sajogyo. 1982. Modernization without Development. Dacca (Bangladesh): The Journal of Social Studies.
- Sajogyo. 2006. Ekososiologi. Sains, Sekretariat Bina Desa. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Cerdas.
- Saleh, Deden D., Widhiana H.P., Siti Fikriyah K., Kus Sri Antoro. 2012. Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer Dalam Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2012), AN. Luthfi (editor). Yogyakarta: PPPM STPN.
- Scot, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance. Oxford: Oxford University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2013. Dari Gunawan Wiradi untuk Kawan-kawan FKMA, <http://selamatkanbumi.com/surat-dari-gunawan-wiradi-untuk-fkma/>, diakses 10 Maret 2013.
- Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik, Jakarta; Salemba Humanika,